

## BAB I

### LATARBELAKANG DAN MASALAH

#### I.1. Latarbelakang:

Jauh sebelum Indonesia memproklamlirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin pergerakan nasional, seperti para pendiri Boedi Oetomo dan Taman Siswa, pada dekade pertama dan kedua abad ini telah menyadari pentingnya pendidikan bagi perbaikan taraf hidup rakyat dan pembaharuan serta pembangunan bangsa. Berdirinya gerakan pendidikan Taman Siswa pada tahun 1922 dan gerakan nasional lainnya telah menunjukkan pula bahwa bukan hanya telah disadari bahwa pendidikan penting melainkan bahwa pendidikan yang serasi dengan aspirasi dan kebutuhan nasional perlu segera dikembangkan.

Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memungkinkan terwujudnya cita-cita untuk menyusun suatu sistem pendidikan yang memenuhi aspirasi nasional. Para pendiri Republik Indonesia dan perumus Undang-Undang Dasar Negara dengan sadar menegaskan usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ter-bengkalai selama berabad-abad, sebagai salah satu dari tiga misi utama bagi berdirinya Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kemudian terkenal dengan UUD 1945. Dalam UUD 1945 ini pulalah para perumus undang-undang dasar menyatakan secara konkrit kebijaksanaan dasar bagi pengembangan

sistem pendidikan nasional pada pasal 31 dalam rumusan sebagai berikut: (1) Pemerintah berkewajiban menyusun dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional; dan (2) bahwa setiap warganegara berhak untuk mendapatkan pengajaran.<sup>1</sup>

Sebagai pelaksanaan kebijaksanaan nasional tersebut Pemerintah pada tahun 1950 menetapkan berlakunya Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, yang terkenal dengan UU no. 4 tahun 1950 jo. UU no. 12 tahun 1954 yang memuat Tujuan, Dasar, Struktur, dan Organisasi sistem pendidikan nasional.<sup>2</sup>

Mulai tahun 1950, pada saat Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dapat sepenuhnya mengatur tata kehidupan bagi seluruh Nusantara, kecuali Irian Jaya, dilaksanakanlah serangkaian usaha pembaharuan sistem pendidikan dan perluasan kesempatan belajar dengan berlandaskan UU tersebut di atas bagi seluruh wilayah Republik Indonesia. Perombakan sistem pendidikan yang majemuk warisan pemerintah kolonial Belanda, yang mengembangkan dan melaksanakan sistem pendidikan sesuai dengan stratifikasi sosial, -dalam rangka mempertahankan status quo masyarakat yang terbelakang-, menjadi sistem pendidikan tunggal yang nasional dan demokratis sesuai dengan UUD 1945, adalah usaha pembaharuan pendidikan yang mendasar. Untuk melihat perbandingan antara sistem pendidikan jaman kolonial dan sistem pendidikan nasional berikut ini disajikan diagram kedua sistem tersebut (lihat diagram 1 dan 2).<sup>3</sup> Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah, pengembangan sistem pendidikan guru yang dapat menunjang keperluan perluasan kesempatan belajar, dan pengembangan sistem

Diagram 1. SISTIM PERSEKOLAHAN JAMAN HINDIA BELANDA

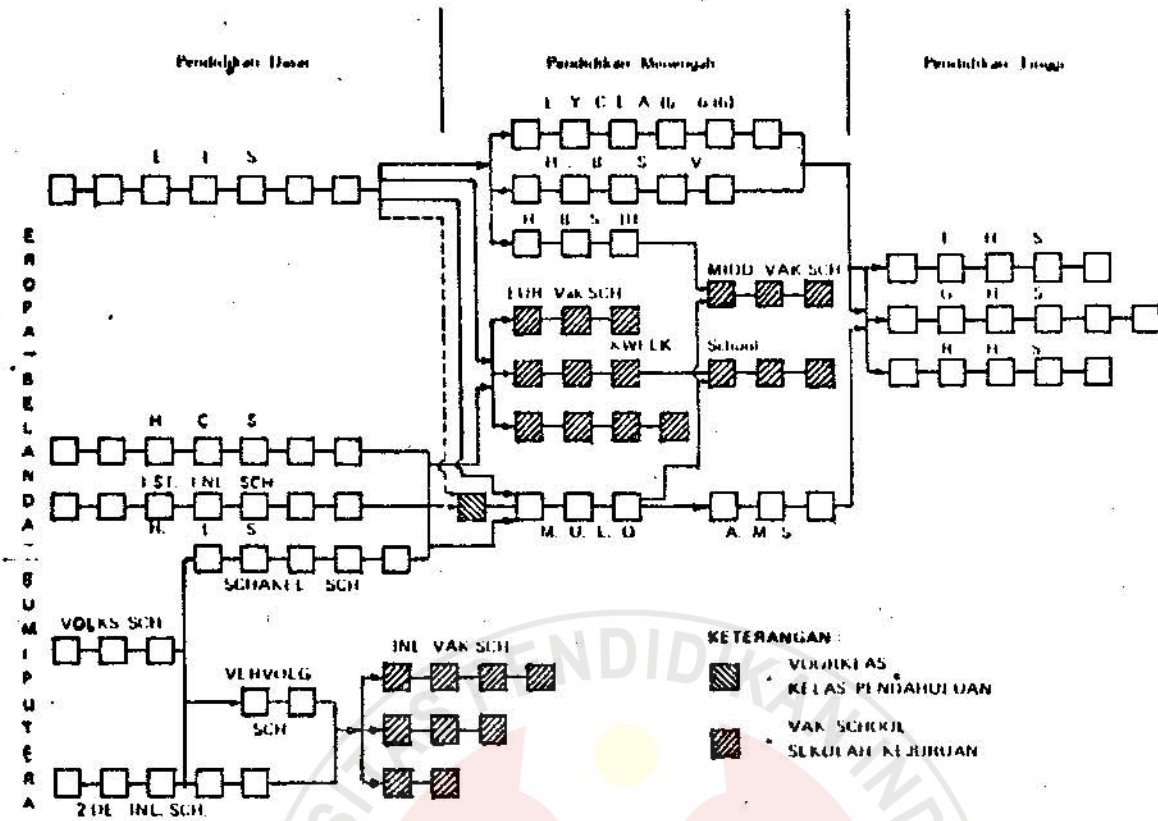
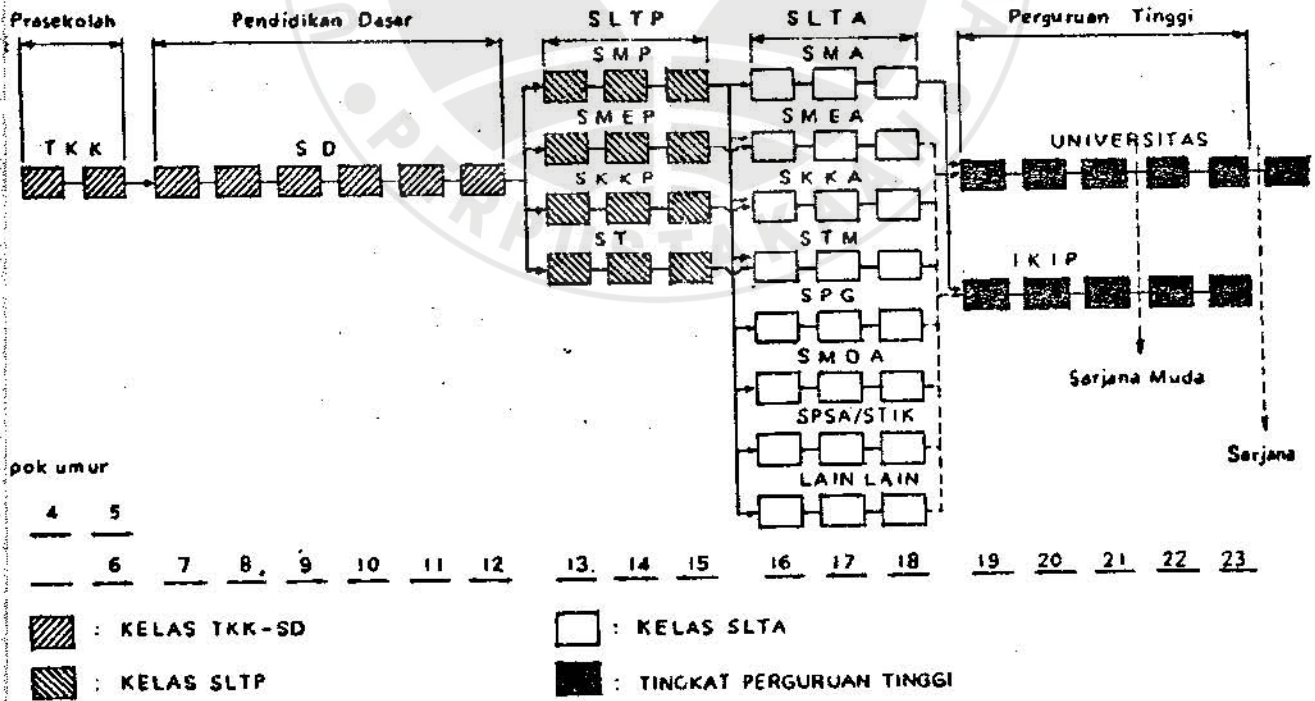


Diagram 2. SISTIM PERSEKOLAHAN SEKARANG

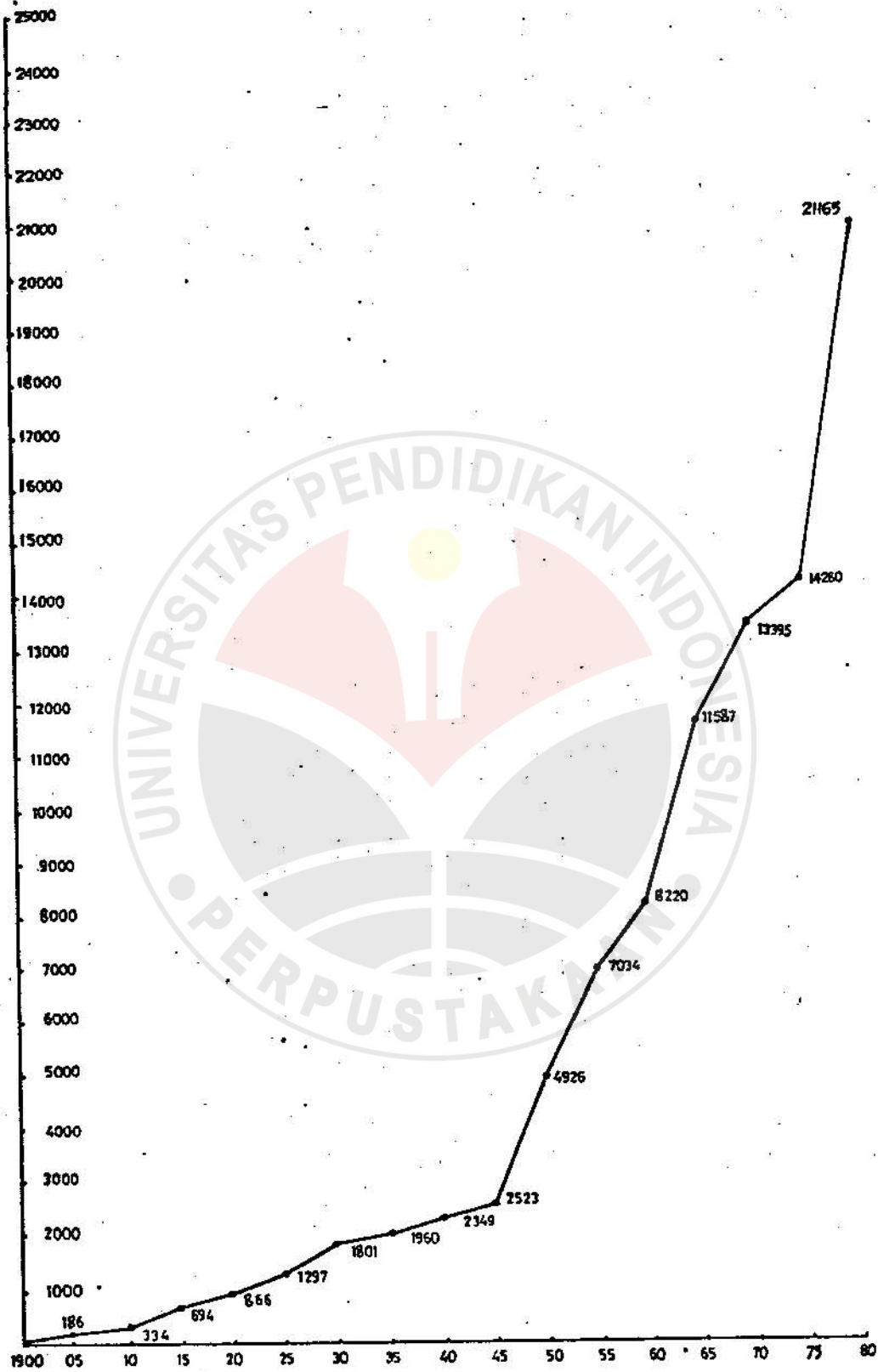


pendidikan tinggi, dan usaha-usaha lainnya yang berthemakan perluasan kesempatan belajar secara horizontal dan vertikal sesuai dengan meningkatnya aspirasi masyarakat akan pendidikan, merupakan wujud usaha-usaha pembaharuan dan perluasan pendidikan yang diakibatkan oleh kemerdekaan.

Pengaruh kebijaksanaan dasar dalam pelaksanaan sistem pendidikan setelah Indonesia merdeka pada perluasan kesempatan mengikuti pendidikan dasar dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan perkembangan pendidikan periode 1900 — 1940<sup>4</sup> dan periode 1940 — 1980.

Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan akhir tahun 1949, diikuti dengan pergolakan politik di dalam negeri dan pemberontakan bersenjata yang mencapai puncaknya pada tahun 1965, dengan meletusnya pemberontakan G.30.S PKI, merupakan suasana yang melatarbelakangi perkembangan pendidikan nasional sampai dengan tahun 1960-an. Dalam keadaan yang demikian wajarlah kiranya bahwa pendidikan yang telah diakui penting, dalam proses pelaksanaannya tidak mendapatkan prioritas yang memadai. Perlakuan yang kurang memadai terjadi juga dalam menangani proses pembaharuan dan pengembangan kurikulum. Perubahan-perubahan kurikulum terjadi pada tahun 1947, tahun 1950, tahun 1962, tahun 1964, dan tahun 1968, tidak lebih dari perubahan dalam kerangka program, tanpa diikuti dengan kegiatan pengembangan bahan pelajaran dan penataran yang memadai.

TABEL 1. PERKEMBANGAN JUMLAH MURID SD  
1900 - 1979/1980  
(dalam ribuan)



Pada tahun 1969 setelah suasana nasional cukup mantap bagi dilaksanakannya pembangunan nasional secara berencana dan integral, para perencana pembangunan nasional dan pembangunan pendidikan melihat adanya ketidak seimbangan dalam perkembangan pendidikan nasional.<sup>5</sup> Perluasan kesempatan belajar tidak diimbangi dengan penguasaan sarana pendidikan yang memungkinkan dijaganya dan ditingkatkannya mutu pendidikan. Para ahli ekonomi yang bertanggung jawab bagi perencanaan pembangunan nasional memandang perkembangan pendidikan telah tidak serasi dan kurang menunjang pembangunan nasional.<sup>6</sup> Mulai saat itu bersamaan dengan dimulainya Repelita I, berbagai kegiatan pembaharuan pendidikan dan penilaian pendidikan nasional dilaksanakan secara serentak.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mashuri dengan "Basic Memorandum"-nya telah mengidentifikasi berbagai ketimpangan dalam perkembangan pendidikan, seperti adanya ketidak-seimbangan horizontal dan vertikal dalam perkembangan pendidikan nasional di samping disadari juga adanya jurang pemisah antara pendidikan di sekolah dengan masyarakat.

Berdasarkan kepada perkiraan-perkiraan tersebut digariskanlah berbagai kegiatan pembaharuan dan perbaikan sistem pendidikan, baik dalam segi administrasi pengelolaan, administrasi keuangan, maupun dalam sistem dan materi kurikulum pendidikan nasional. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan dan pembaharuan sistem dan materi kurikulum:

- (1) Penulisan dan pengadaan buku-buku pelajaran, yang terkenal dengan Proyek Paket Buku, dengan tugas menyiapkan naskah dan memperbanyak buku-buku pelajaran untuk murid, dengan pedoman gurunya, dalam bidang-bidang pelajaran utama: matematika, ilmu pengetahuan alam (IPA), ilmu pengetahuan sosial (IPS), dan Bahasa.
- (2) Penetapan Proyek-Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, yang dikoordinir oleh sebuah Panitia yang dibentuk oleh Menteri P dan K, dengan tugas bersama-sama dengan 8 IKIP melaksanakan Proyek Perintis untuk mengembangkan sistem pendidikan dasar dan menengah, yang dikenal dengan Sekolah Pembangunan.
- (3) Penetapan Proyek Pembaharuan Kurikulum dan Metoda Mengajar, yang bertugas mengembangkan kurikulum berbagai bidang pelajaran secara terpisah-pisah untuk sekolah dasar. Pelaksananya diserahkan kepada para ahli pendidikan dikoordinasikan oleh Direktorat Pendidikan Dasar.
- (4) Pendirian Proyek Sekolah Teknik Menengah Pembangunan dengan tugas mengembangkan sistem pendidikan teknik menengah untuk menghasilkan teknisi yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan.

Dalam pada itu mulai tahun 1969 dibentuk juga Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) yang secara komprehensif mengadakan penelitian dan penilaian pendidikan dalam berbagai seginya secara horizontal dan vertikal, dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Pada tahun 1973, pada saat Rencana Pembangunan Lima tahun Pertama mulai memasuki tahun-tahun terakhirnya, kegiatan-kegiatan pembaharuan pendidikan yang berjalan sejak permulaan Pelita I mulai mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan yang sedang berjalan. Hasil-hasil yang mulai mempengaruhi proses pelaksanaan sistem pendidikan antara lain adalah:

- (1) paket buku yang mulai memasuki beberapa sekolah dengan metoda dan bahan yang baru, seperti matematika baru;
- (2) perubahan struktur kurikulum beberapa sekolah menengah di DKI Jakarta dan Jawa Barat sesuai dengan bayangan akan diberlakukannya kurikulum sekolah pembangunan;
- (3) implementasi hasil-hasil PKMM pada beberapa sekolah dasar; dan
- (4) rencana penyebaran gagasan Sekolah Pembangunan pada tahun 1974, yang mendorong diterapkannya beberapa sekolah komparasi di berbagai daerah

Dalam pada itu para pelaksana pendidikan di lapangan, seperti guru dan kepala sekolah yang selalu berusaha berpegang kepada landasan hukum, merasa bahwa beberapa hasil pembaharuan pendidikan yang mulai diterapkan di sekolah tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 1968, di samping itu mereka pun belum mendapatkan penataran yang memadai untuk menerapkan hasil-hasil pembaharuan yang disampaikan melalui buku-buku baru.



Dalam situasi yang demikian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, pada saat itu Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, mengambil kebijaksanaan untuk mempertegas peranan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penelitian dan pengembangan yang berjangka panjang dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya jangka pendek dan merupakan perbaikan langsung kepada praktek pendidikan yang sedang berjalan.

Salah satu kebijaksanaan penting yang diambil oleh Menteri Soemantri adalah penundaan penyebaran gagasan yang dikembangkan melalui PPSP<sup>7</sup> dan pemindahan tanggungjawab pengelolaan PPSP dari Panitia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan,- pada saat itu meliputi pendidikan dasar, menengah dan tinggi,- ketangan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan.<sup>8</sup>

Pada tahun 1974, dengan wafatnya Menteri Soemantri Brojonegoro, penggantinya Menteri Syarif Thayeb menegaskan kebijaksanaan pengelolaan dan pembinaan pendidikan nasional, sebagai kelanjutan dari Menteri yang digantikannya, dengan berpangkal kepada empat bidang masalah pokok yang pada hakekatnya ditarik dari hasil-hasil penilaian dan penelitian yang dilakukan oleh PPNP, yaitu:

- (1) bidang-bidang masalah yang berhubungan dengan pemerataan pendidikan;
- (2) bidang-bidang masalah yang berhubungan dengan relevansi pendidikan;
- (3) bidang-bidang masalah yang berhubungan dengan mutu pendidikan; dan

- (4) bidang-bidang masalah yang berhubungan dengan efisiensi dan efektifitas pendidikan.

Dengan berpangkal kepada empat bidang masalah pokok tersebut dilanjutkanlah berbagai usaha pembaharuan pendidikan baik yang berjangka panjang maupun yang berjangka pendek. Proyek Perintis Sekolah Pembangunan ditetapkan untuk meneruskan kegiatannya dalam usaha memperbaharui sistem pendidikan dasar dan menengah melalui penelitian dan pengembangan yang sifatnya berjangka panjang.

Dalam pada itu kesimpang siuran tentang pelaksanaan kurikulum sekolah, sebagai akibat dari masih berlakunya kurikulum 1968 dan munculnya hasil-hasil penulisan paket buku di sekolah serta berlakunya beberapa model kurikulum bagi sekolah menengah, yang membingungkan para kepala sekolah dan guru, dirasakan oleh Pimpinan Departemen P dan K perlu untuk segera diakhiri.<sup>9</sup> Atas dasar pertimbangan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb menetapkan perlu diberlakukannya satu sistem kurikulum baku bagi sekolah-sekolah dasar dan menengah, menjelang ditetapkannya sistem kurikulum baru yang dikembangkan atas dasar hasil penelitian dan pengembangan yang mantap melalui PPSP.<sup>10</sup>

Berdasarkan kebijaksanaan Menteri Syarif Thayeb tersebut dimulailah kegiatan pembakuan kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah pada tahun 1974 di bawah koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K), badan yang juga bertanggungjawab bagi pengelolaan PPSP. Pada akhir tahun 1975 hasil kegiatan pembakuan kurikulum telah diterima dan ditetapkan oleh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thayeb sebagai Kurikulum 1975 dan berlaku bagi SD, SMP, dan SMA mulai tahun pelajaran 1976. Di dalam kurikulum ini beberapa gagasan dasar yang dikembangkan melalui PPSP, seperti kerangka tujuan dan materi kurikulum, dasar organisasi dan pendekatan penyampaian pelajaran, dan dasar-dasar bagi evaluasi kemajuan belajar telah diterapkan secara terbatas sesuai dengan sifat peralihan dari kurikulum lama kepada kurikulum baru yang masih memerlukan pematapan lapangan.<sup>11</sup>

Dalam pada itu PPSP, di bawah koordinasi dan pengelolaan BP3K, mulai tahun 1974 dengan berdasar kepada "Master Design" yang telah disepakati bersama dan disyahkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 41 tahun 1974, melanjutkan kegiatan penelitian dan pengembangannya dalam rangka memperbaharui sistem kurikulum pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menerapkan cobakan strategi belajar-mengajar baru dengan sistem modul dan berbagai gagasan baru yang dasar-dasarnya telah diterapkan pada kurikulum 1975. Pada tahun 1978 setelah selama tiga tahun gagasan-gagasan baru dicobakan melalui PPSP, dengan berdasar kepada umpan balik yang diperoleh melalui program evaluasi yang sistematis dan pengamatan lapangan, dilakukan program revisi bahan-bahan dan strategi penyajian dengan memantapkan konsep belajar tuntas untuk dilaksanakan secara lebih mantap pada tahun 1979.<sup>12</sup>

Menurut Rencana Induk Pembaharuan Pendidikan melalui PPSP, pada tahun 1982, kegiatan penilaian secara menyeluruh tentang efektifitas pelaksanaan sistem kurikulum PPSP sudah akan menyampaikan laporan-laporannya. Dengan demikian pada tahun 1983 Pimpinan Departemen

P dan K dapat mengambil keputusan tentang hasil-hasil pengembangan sistem kurikulum PPSP yang dapat disebarakan secara nasional.

Dalam pada itu pada akhir tahun pengajaran 1979/1980 sistem kurikulum PPSP telah melepaskan angkatan ketiga lulusan SD, lulusan SMP, dan lulusan SMA yang sepenuhnya menggunakan sistem kurikulum PPSP. Pada tahun yang sama sistem kurikulum 1975 telah melepas angkatan kedua lulusan SD, SMP, dan SMA yang sepenuhnya menggunakan kurikulum 1975.

Studi ini menyadari bahwa sejak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan serangkaian kegiatan pembaharuan dan perbaikan sistem pendidikan, seperti yang telah digambarkan secara sepintas lalu, banyak pandangan dan pertanyaan di masyarakat; baik dari kalangan orang tua murid yang sangat memperhatikan pendidikan anaknya; baik dari kalangan guru dan kepala sekolah; baik dari tokoh-tokoh masyarakat di dalam dan di luar parlemen; maupun para cendekiawan dan wartawan. Pandangan dan pertanyaan tersebut ada yang disampaikan secara tertulis melalui mass media ataupun dalam bentuk korespondensi langsung, maupun yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada kesempatan lokakarya, seminar dan penataran atau rapat kerja. Semua pandangan dan pertanyaan yang datang dari berbagai kalangan tersebut, pada hakekatnya ditujukan kepada pertanyaan pokok "Sampai berapa jauh berbagai kegiatan pembaharuan pendidikan yang dijalankan sejak tahun 1970 akan mengenai sasarannya yaitu serasinya pendidikan dengan harapan dan perkembangan masyarakat?"

Terhadap pertanyaan ini belum ada studi yang secara khusus berusaha mencari jawabannya. Studi kualitas pendidikan SD dan SMP,<sup>13</sup> yang dilakukan BP3K pada hakekatnya baru menjelajahi tingkat efektifitas pelaksanaan kurikulum 1968, diukur dari tingkat hasil belajar siswa secara kognitif.

Studi inipun tidak bermaksud untuk ikut memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang menyangkut berbagai kegiatan pembaharuan dalam hubungannya dengan usaha meningkatkan keserasian pendidikan dengan harapan masyarakat, melainkan ingin, secara khusus, meneliti pengaruh sistem kurikulum PPSP dan kurikulum 1975 terhadap kualitas proses dan mutu hasil belajar para siswa yang mengikuti jenis sistem kurikulum tersebut, khususnya pada tingkat sekolah dasar.

## I.2. Pembatasan Masalah:

Perkembangan pendidikan di Indonesia, secara kuantitatif, seperti dapat dilihat pada Tabel 1.1 (untuk tingkat sekolah dasar), telah berjalan demikian cepat, sehingga sukar dapat dibayangkan bagaimana perkembangan kuantitatif ini dapat dilaksanakan secara memadai dengan sarana pendidikan sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan. Masalah yang berat terutama berhubungan dengan penyediaan tenaga guru baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Apalagi pada periode pembangunan nasional yang berencana, di mana sektor pendidikan hanyalah satu dimensi dari keseluruhan program pembangunan yang memberikan tenaga kerja.

Lebih dari itu berbagai sektor pembangunan memiliki daya tarik yang lebih tinggi daripada sektor pendidikan bagi generasi muda sebagai calon tenaga kerja. Karena itu masalah penyediaan tenaga kependidikan untuk menunjang perkembangan pendidikan merupakan masalah yang kritis yang memerlukan pemecahan secara non-tradisional.

Berbagai studi yang dilakukan melalui PPNP dari 1969 -- 1972 telah memberikan gambaran betapa kurang memadainya sarana pendidikan yang ada bagi kemungkinan terjadi proses belajar yang dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sebagai ilustrasi berikut ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang diperoleh: "Sebagian besar gedung sekolah dasar digunakan lebih dari satu kali dalam sehari, di beberapa tempat bahkan digunakan tiga kali dalam satu hari."<sup>14</sup> Dalam keadaan demikian tampak jelas bahwa tidak mungkin program kurikulum yang telah ditetapkan alokasi waktunya dalam setiap minggu dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaannya lebih parah lagi pada tingkat pendidikan menengah. Pada periode ini (1969 -- 1972) banyak sekolah yang muridnya tidak memiliki sebuah buku pelajaranpun, sedangkan pendidikan gurunya banyak yang belum memenuhi syarat pendidikan minimum. Salah satu studi menunjukkan bahwa 21% dari guru SMP untuk pelajaran matematika yang berpendidikan guru matematika.<sup>15</sup> Di berbagai tempat di luar Jawa bahkan banyak SMP yang gurunya hanya memiliki pendidikan SPG. Keadaan ini nampaknya belum banyak berubah pada enam tahun berikutnya. Dalam satu studi

tahun 1977 diketemukan bahwa masih kurang lebih 30% dari guru SD yang belum memiliki dasar pendidikan SPG.<sup>16</sup>

Sarana pendidikan yang demikian ternyata dibarengi dengan kurang memadainya kualitas pelajaran di kelas sebagai yang disimpulkan oleh berbagai studi PPNP. Antara lain kesimpulan studi itu menyatakan:

The survey was conducted four months after the opening of the school year, but 72 teachers, according to their own reports, had not yet given an examination or test of any kind, oral, written, or practical, beyond the questions asked informally during a lesson. Of the teachers who had given a written test, only a third had returned the corrected papers to the students. By any standards and in any conditions, this is sheer bad teaching. It is hard to believe it is as general as the sample would indicate, but, if it goes on in substantial proportion of the schools, many secondary school pupils in Indonesia are being deprived of aids to learning and independent thinking that are commonly regarded as good pedagogical practice in even routine, old fashioned school systems.<sup>17</sup>

Studi kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama yang dilakukan BP3K, pada tahun 1975, tiga tahun setelah studi tentang kondisi pendidikan dilakukan, menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar dan menengah pertama, dilihat dari hasil belajar mereka secara kognitif, belum mencapai harapan pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Dari penelitian Moégiadi dan kawan-kawannya tersebut nampak masih besarnya disparitas mutu hasil belajar antara berbagai daerah dan masih rendahnya tingkat penguasaan pelajar SD pada tahun 1975.<sup>18</sup>

Dengan latarbelakang kondisi sistem pendidikan dan mutu hasil belajar yang demikian, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan direncanakan<sup>19</sup> dan ditugaskan untuk mengembangkan sistem pendidikan dasar dan menengah yang lebih efektif, relevan, dan efisien. Dalam pada itu pada tahun 1973 — 1974,—pada saat berbagai hasil pembaharuan pendidikan memasuki lapangan dan pada saat Pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan dana pendidikan yang berlipat ganda bila dibandingkan dengan program Pembangunan tahap sebelumnya,— direncanakanlah pembakuan kurikulum baru sebagai yang telah disinggung di bagian terdahulu. Kedua sistem kurikulum tersebut yaitu: PPSP terbatas pada delapan gugus sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas; dan kurikulum 1975 berlaku pada seluruh sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas di seluruh Indonesia; pada hakekatnya memiliki kerangka tujuan dan materi program yang sama. Perbedaan utama kedua sistem kurikulum ini pada dasarnya terletak pada sistem pelaksanaannya. Terutama pada dimensi sistem belajar mengajar yang direncanakan dan dilaksanakan serta peranan yang diharapkan dari seorang guru. Perbedaan kedua kurikulum ini akan dibahas lebih terperinci pada Bab III tentang Landasan Teoritis dari penelitian.

Pada saat studi ini mulai dilaksanakan, sistem kurikulum PPSP telah meluluskan dua angkatan baik SD, SMP, maupun SMA, dan pada akhir tahun pengajaran 1979/1980 akan melepaskan angkatan lulusan ketiga. Sedangkan kurikulum 1975 yang dilaksanakan pada permulaan tahun 1976 akan melepaskan angkatan lulusan keduanya pada tahun pengajaran 1979/1980.



Dua pertanyaan pokok yang akan diteliti, dengan demikian adalah,

1. Sampai berapa jauh sistem kurikulum 1975 dan sistem kurikulum PPSP telah mempengaruhi perbaikan kualitas proses belajar yang dialami para pelajar?
2. Sampai berapa jauh kualitas proses belajar yang dikembangkan melalui sistem kurikulum 1975 dan sistem kurikulum PPSP mempengaruhi perbaikan mutu hasil belajar para pelajarnya baik dalam pengertian kognitif maupun afektif?

Peranan guru dalam menentukan terlaksananya suatu sistem kurikulum secara efektif dan efisien diakui pentingnya dalam pelaksanaan sistem pendidikan selama ini. Dalam pada itu disadari bahwa pedoman operasional yang jelas bagi diterapkannya suatu sistem kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan dan motivasi guru melaksanakan suatu program kurikulum. Secara operasional pelaksanaan sistem kurikulum secara efisien dan efektif pada tingkatan proses akan terlihat pada proses belajar yang dialami para pelajar. Sistem evaluasi yang digunakan, jelasnya rencana belajar-mengajar yang disusun, bentuk interaksi guru-murid-bahan pelajaran yang dipilih dan dilaksanakan, media pendidikan yang digunakan secara memadai, dan sistem pemberian nilai yang digunakan adalah dimensi-dimensi dari sistem kurikulum yang mempengaruhi kualitas proses belajar yang dialami dan dilakukan pelajar. Dalam hubungan ini kemampuan dan kemauan profesional seorang guru dan kerangka sistem kurikulum yang dianut diperkirakan sangatlah menentukan kualitas proses dan mutu hasil belajar.

Atas dasar pertimbangan di atas di dalam mempelajari dua pertanyaan pokok di atas studi ini ingin meneliti hubungan faktor - faktor:

- (1) Sistem kurikulum;
- (2) Sikap, latarbelakang sosial-ekonomi dan latarbelakang pendidikan serta pengalaman profesional guru;
- (3) Sikap, latarbelakang kognitif dan latarbelakang sosial-ekonomi pelajar;
- (4) Proses belajar; dan
- (5) Hasil belajar, baik secara kognitif maupun afektif.

Penelitian mengenai hubungan antara faktor-faktor tersebut dimaksudkan untuk mencari jawab atas pertanyaan pokok yang ketiga, yaitu:

3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kualitas proses dan mutu hasil belajar?

Catatan Bibliografi:

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 31.
2. Undang-undang Pokok Pendidikan no. 4 tahun 1950 jo. no. 12, tahun 1954.
3. Pendidikan di Indonesia. Jakarta, BP3K., Departemen P dan K., 1976, halaman 38 s.d 42.
4. Ibid., halaman 53.
5. Mashuri. Basic Memorandum tentang Pendidikan. Jakarta, Departemen P dan K., 1969.
6. Rencana Pembangunan Lima Tahun R.I. 1969/1970 s.d 1973/1974, IIC. Jakarta: Departemen Penerangan R.I., halaman 15 s.d 17.
7. Soemantri Brojonegoro. Pidato Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 1973. Jakarta, Departemen P dan K., 1973.
8. "Keputusan Menteri P dan K. no. 129/P/1973" dalam Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembaharuan Pendidikan melalui PPSP, Jakarta, BP3K., Departemen P dan K., 1976, halaman 1 s.d 3.
9. Syarif Thayeb. "Pidato Pengarahan pada Pembukaan Rapat Koordinasi PPSP tahun 1974" dalam Keputusan-keputusan dan Garis-garis Kebijaksanaan Menteri P dan K dalam Pembaharuan Pendidikan melalui PPSP, Jakarta, BP3K., Departemen P dan K., 1976, halaman 10 s.d 13.
10. Ibid., halaman 13.
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 008C/4/1975 Tentang Pembakuan Kurikulum 1975. Jakarta, Departemen P dan K, 1976.
12. Setijadi. "Laporan Ketua BP3K pada Rapat Koordinasi PPSP yang ke VIII tahun 1978" dalam Kemajuan dan Rencana Program Pembaharuan Pendidikan Dasar dan Menengah melalui PPSP. Jakarta, BP3K., Departemen P dan K., 1980, halaman 46 s.d 67.

13. Moegiadi dan kawan-kawan. Penilaian Nasional Kualitas Pendidikan di Tingkat SD. Jakarta, BP3K., Departemen P dan K., 1976, halaman 20 s.d 72.
14. Beeby, G.E. Assessment of Indonesia Education: A Guide in Planning. New Zealand Council for Education Research and Oxford Press, Wellington, 1979, halaman 74 s.d. 75.
15. Winarno S. and Thomas, R. Murray. The Quantity and Quality of Teachers in Indonesia - An Assessment in 1969 s.d. 1971. halaman 45.
16. Ruth Darusman. Alternative Educational Strategies and New Financial Implication. BP3K., Departemen P dan K., 1978, halaman 12.
17. Beeby, C.E. Op.cit., halaman 79.
18. Moegiadi dan kawan-kawan. Op.cit., halaman 21.
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 041 tahun 1974 tentang Pembaharuan Pendidikan melalui PPSP. Jakarta., BP3K., Departemen P dan K., 1975.